

Analisis Kesiapan Standar Mutu dan Kepatuhan Halal Pemasok Pangan Lokal dalam Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur

Ewit Nurdyanti^{1*}, Muhamad Ali², Isfi Sholihah³

¹⁻³Universitas Hamzanwadi, Lombok Timur, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : ewitnurdyanti11@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 07 Juli, 2026

Page: 2635-2642

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.2960>

Article History:

Received: Mei 22, 2026

Revised: Juni 02, 2026

Accepted: Juli 18, 2026

Abstract : *This study analyses quality-standard readiness, halal compliance, and local supplier preparedness in the Free Nutritious Meals Programme (MBG) supply chain in East Lombok Regency. A descriptive-associative quantitative approach involved 41 local food suppliers and SPPG kitchen managers using Likert-scale questionnaires and interviews. Data were analysed through validity and reliability tests, multiple linear regression, t-tests, F-tests, and coefficients of determination using SPSS. Results show that halal compliance (sig. 0.002) and local supplier preparedness (sig. 0.012) significantly affect the MBG supply chain, whereas quality-standard readiness has no significant effect (sig. 0.760). Simultaneously, all three variables have a significant effect ($F = 14.017$; sig. 0.000), contributing 53.2%. Halal compliance is the most dominant factor. The study recommends strengthening halal certification, food-quality standards, inter-agency coordination, and continuous SJPH and GMP training.*

Keywords : *Food Supply Chain; Quality Standards; Halal Compliance; Local Supplier Readiness; Free Nutritious Meals Programme (MBG)*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan standar mutu, kepatuhan halal, dan kesiapan pemasok pangan lokal dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-asosiatif terhadap 41 pemasok pangan lokal dan pengelola dapur SPPG dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner skala Likert dan wawancara. Data dianalisis dengan uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi menggunakan SPSS. Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan halal (sig. 0,002) dan kesiapan pemasok lokal (sig. 0,012) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap rantai pasok MBG, sedangkan kesiapan standar mutu tidak signifikan (sig. 0,760). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan ($F = 14,017$; sig. 0,000) dengan kontribusi 53,2%. Merujuk dari hal tersebut, maka kepatuhan halal menjadi faktor paling dominan. Penelitian merekomendasikan penguatan sertifikasi halal, standar mutu pangan, koordinasi antarlembaga, serta pelatihan SJPH dan GMP berkelanjutan.

Kata Kunci : Rantai Pasok Pangan; Standar Mutu; Kepatuhan Halal; Kesiapan Pemasok Lokal; Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

PENDAHULUAN

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas tinggi mutlak diperlukan sebagai kunci utama dalam mendorong kemajuan serta kesejahteraan suatu bangsa di era globalisasi saat ini (Roos, 2025). Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan isu ini sebagai prioritas utama dalam agenda nasional, dengan komitmen penuh mewujudkan visi Indonesia yang maju secara teknologi dan ekonomi, mandiri dalam menghadapi tantangan global, serta berkeadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu program yang dirancang untuk mendukung agenda tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu visi-misi yang diusulkan pada Pemilu 2024 oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak sekolah (TK-SMA), balita, ibu menyusui, serta ibu hamil, sehingga diharapkan dapat membantu pencegahan stunting dan wasting sejak dalam kandungan demi menciptakan generasi emas yang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 (Widyasari *et al.*, 2025).

Berdasarkan data dari World Food Programme (WFP), sebanyak 107 negara telah menerapkan kebijakan makanan sekolah (school feeding) pada tahun 2024, dengan peningkatan signifikan pada negara-negara berpenghasilan menengah-bawah. Bagi banyak anak, makanan sekolah merupakan satu-satunya makanan yang mereka terima setiap hari dan terbukti mampu meningkatkan kecukupan makronutrien dan mikronutrien dalam diet anak-anak (Programme, 2026). Program MBG di Indonesia bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan menjadi katalisator utama dalam merealisasikan visi SDM unggulan dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Standar mutu pangan merupakan salah satu indikator penting dalam rantai pasok program MBG. Pelaksanaan MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dirancang dengan menerapkan praktik terbaik industri pangan global melalui penerapan standar keamanan pangan yang skonsisten dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Codex Alimentarius (Badan Gizi Nasional [BGN], 2025). Namun, keberhasilan penerapan standar tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan pemasok pangan lokal sebagai ujung tombak rantai pasok, khususnya dalam menyediakan bahan pangan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kehalalan (Indonesia, 2026).

Kepatuhan terhadap standar halal merupakan dimensi krusial dalam penyediaan pasokan pangan, terutama di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan bahwa setiap produk pangan telah melalui proses sertifikasi halal yang sah (Gunawan *et al.*, 2021). Tantangan yang sering muncul di lapangan meliputi rendahnya kesadaran pemasok lokal tentang prosedur sertifikasi serta keterbatasan sumber daya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal (Nurhayati *et al.*, 2022).

Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari Nusa Tenggara Barat dan didata memiliki jumlah dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) paling banyak se-Indonesia terdapat beberapa kecamatan yang diketahui menjadi pemasok utama bahan pangan, mulai dari sayur-mayur, daging, hingga produk olahan UMKM, seperti Kecamatan Sikur, Masbagik, Pringgasela, Sukamulia, dan Selong. Wilayah-wilayah ini memiliki potensi pertanian dan usaha pangan yang cukup besar, namun menghadapi tantangan berbeda-beda dalam implementasi standar mutu dan keamanan pangan (Yusuf & Hasbullah, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang secara khusus menganalisis kesiapan standar mutu dan kepatuhan halal pemasok pangan lokal dalam rantai pasok Program MBG di Kabupaten Lombok Timur. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana pemasok pangan lokal mampu memenuhi standar yang ditetapkan sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat

pengawasan mutu pangan serta meningkatkan peran pemasok lokal dalam mendukung keberhasilan program MBG secara berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Rantai Pasok Pangan dalam MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengintegrasikan rantai pasok pangan lokal sebagai bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan bahan baku secara berkelanjutan. Rantai pasok pangan dalam program ini mencakup tahapan terintegrasi mulai dari penyediaan bahan baku oleh pelaku UMKM seperti petani dan peternak lokal, pengolahan di fasilitas produksi, distribusi, hingga penyiapan akhir di dapur SPPG (BGN, 2025). Integrasi ini penting untuk mempertahankan kualitas gizi, keamanan pangan, serta kepatuhan halal sepanjang alur program, sesuai dengan prinsip Supply Chain Management (SCM) halal yang menekankan traceability penuh guna mencegah kontaminasi silang dan degradasi mutu (Khairurrizki, 2026). Di Kabupaten Lombok Timur, implementasi MBG sangat bergantung pada kesiapan pemasok pangan lokal yang didominasi oleh UMKM dan petani skala kecil. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program masih menghadapi kendala pada aspek distribusi, kualitas bahan, dan kontinuitas pasokan. Keterbatasan infrastruktur logistik dingin (cold chain) dan koordinasi antarstakeholder berpotensi mengurangi optimalisasi pangan lokal yang menjadi salah satu tujuan MBG dalam mendukung ketahanan pangan daerah (Suryana *et al.*, 2021).

Standar Mutu Pangan

Standar mutu pangan mencakup aspek kebersihan, keamanan, kualitas, dan kelayakan konsumsi. Standar mutu pangan pada Program MBG di Indonesia telah diatur oleh regulasi nasional yang wajib dipatuhi, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPOB/GMP), Prosedur Operasional Sanitasi Standar (SSOP), dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) (RI, 2025). Ketiga standar ini menjadi syarat utama agar makanan aman dari bahaya biologis, kimia, atau fisik sepanjang rantai pasok. Penerapan standar mutu mengacu pada Keputusan Kepala BGN RI No. 52.2 Tahun 2025 yang berisi tentang Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada SPPG, yang mengintegrasikan prinsip keamanan pangan internasional ke dalam sistem sertifikasi SPPG (BGN, 2025). Namun demikian, banyak UMKM pangan lokal, termasuk di Lombok Timur, belum memiliki sertifikasi lengkap karena tingginya biaya, kurangnya pelatihan, dan kerumitan prosedur, sehingga mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam rantai pasok MBG yang memprioritaskan keamanan bagi 55 juta penerima manfaat.

Kepatuhan Halal dalam Supply Chain

Kepatuhan halal dalam rantai pasok MBG mencakup penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), penerbitan Sertifikat Halal dari BPJPH, serta mekanisme traceability untuk menjaga integritas halal dari tahap hulu (bahan baku) hingga hilir (penyiapan makanan di SPPG), sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta umat. Bagi pemasok MBG, kewajiban mencakup Nomor Kontrol Veterinaria (NKV) untuk produk hewani, verifikasi Juleha (sistem halal digital), dan Sertifikat Halal BPJPH, dengan capaian 2.340 SPPG bersertifikat halal hingga Februari 2026 sebagai bagian dari percepatan nasional (Gunawan *et al.*, 2021). Di Kabupaten Lombok Timur, tantangan utama meliputi rendahnya literasi halal di kalangan UMKM pangan lokal, keterbatasan akses fasilitasi sertifikasi, dan kurangnya infrastruktur traceability seperti cold chain halal. Meskipun demikian, potensi regional sebagai pemasok daging dan sayur cukup kuat berkat mayoritas penduduk yang beragama Islam dan kedekatan geografis dengan dapur MBG. Intervensi diperlukan melalui pelatihan SJPH dan kolaborasi BPJPH BGN untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok nasional (Nurhayati *et al.*, 2022).

Kesiapan Pemasok Lokal

Kesiapan pemasok lokal dalam MBG didefinisikan sebagai kemampuan komprehensif UMKM untuk memenuhi standar mutu pangan (GMP/CPPOB, SSOP, dan HACCP) serta persyaratan halal (SJPH dan Sertifikat Halal BPJPH) melalui penguatan infrastruktur fisik, peningkatan kompetensi SDM, serta adaptasi terhadap regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang SJPH (Peraturan

Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, 2019; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021). Analisis SWOT pada Halal Supply Chain Management (HSCM) mengungkap kekuatan berupa basis pasar Muslim mayoritas (98% populasi Lombok Timur) dan kedekatan geografis yang meminimalkan risiko degradasi mutu, namun kelemahan mencakup infrastruktur halal terbatas, rendahnya literasi regulasi, serta ancaman kompetisi pemasok nasional berskala besar. Peluangnya terletak pada program bantuan sertifikasi gratis dari Kemenkes dan BPJPH (Indonesia, 2026; Handayani & Purnomo, 2023). Kesiapan pemasok lokal tidak hanya bergantung pada kemampuan produksi, tetapi juga pada aspek pengetahuan, akses terhadap informasi, serta dukungan pemerintah dan lembaga terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-asosiatif untuk menganalisis kesiapan standar mutu dan kepatuhan halal pemasok pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kesiapan Standar Mutu (X1), Kepatuhan Halal (X2), dan Kesiapan Pemasok Lokal (X3), sedangkan variabel dependen adalah Rantai Pasok MBG (Y). Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) dengan skala pengukuran Likert lima tingkat. Responden diminta memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan dengan pilihan jawaban berjenjang mulai dari Sangat Setuju (5), Setuju (4), Ragu-Ragu (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1), serta wawancara langsung kepada pemasok dan pemilik dapur SPPG terkait. Instrumen terdiri dari 24 butir pernyataan yang mencakup indikator Standar Mutu, Kepatuhan Halal, Kesiapan Pemasok Lokal, dan Kondisi Rantai Pasok MBG.

Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan perangkat lunak SPSS dengan tahapan: (1) uji validitas untuk memastikan r hitung $>$ r tabel ($\alpha = 0,05$); (2) uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha $>$ 0,60; (3) analisis deskriptif berupa nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi; (4) analisis regresi linear berganda dengan model $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$; (5) uji-t untuk pengaruh parsial; (6) uji-F untuk pengaruh simultan; serta (7) koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini diawali dengan pengolahan data dari hasil kuesioner, observasi, dan wawancara yang dilakukan kepada responden yang terdiri dari pemasok pangan lokal dan pihak terkait dapur SPPG di Kabupaten Lombok Timur. Berikut disajikan hasil analisis statistik secara berurutan.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan setiap butir pernyataan mampu mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian terhadap 24 butir pernyataan disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
P1	0,442	0,316	Valid
P2	0,489	0,317	Valid
P3	0,702	0,318	Valid
P4	0,631	0,319	Valid
P5	0,586	0,320	Valid
P6	0,771	0,321	Valid
P7	0,720	0,322	Valid
P8	0,503	0,323	Valid

P9	0,462	0,324	Valid
P10	0,645	0,325	Valid
P11	0,569	0,326	Valid
P12	0,571	0,327	Valid
P13	0,618	0,328	Valid
P14	0,685	0,329	Valid
P15	0,691	0,330	Valid
P16	0,571	0,331	Valid
P17	0,625	0,332	Valid
P18	0,684	0,333	Valid
P19	0,431	0,334	Valid
P20	0,452	0,335	Valid
P21	0,595	0,336	Valid
P22	0,659	0,337	Valid
P23	0,626	0,338	Valid
P24	0,572	0,339	Valid

Berdasarkan Tabel 1, seluruh 24 butir pernyataan dinyatakan valid dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel pada masing-masing butir. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti dengan baik.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan guna mengetahui konsistensi instrumen pada penelitian. Instrumen dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,921	24

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,921 ($> 0,60$), sehingga instrumen penelitian dinyatakan sangat reliabel dan layak digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data setiap variabel penelitian berdasarkan dari nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Hasil analisis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min.	Maks.	Mean	Std. Dev.
Kesiapan Standar Mutu	41	22,00	30,00	27,68	2,434
Kepatuhan Halal	41	24,00	30,00	27,98	2,264
Kesiapan Pemasok Lokal	41	20,00	30,00	26,44	3,210
Rantai Pasok MBG	41	23,00	30,00	27,54	2,122

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata kepatuhan halal (27,98) merupakan nilai tertinggi di antara variabel penelitian, diikuti oleh kesiapan standar mutu (27,68) dan rantai pasok MBG (27,54). Sementara itu, kesiapan pemasok lokal memiliki nilai rata-rata terendah (26,44) dengan

standar deviasi tertinggi (3,210), mengindikasikan variasi yang lebih besar di antara responden dalam hal kesiapan operasional.

Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji-t (Parsial)

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama maupun parsial. Hasil analisis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji-t

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	8,214	3,134	~	2,621	.013
Kesiapan Standar Mutu (X1)	-.050	.161	-.057	-.308	.760
Kepatuhan Halal (X2)	.497	.145	.530	3,428	.002
Kesiapan Pemasok Lokal (X3)	.257	.098	.389	2,636	.012

Berdasarkan Tabel 4 di atas, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah: $Y = 8,214 - 0,050X_1 + 0,497X_2 + 0,257X_3$. Secara parsial, variabel kepatuhan halal (X2) berpengaruh signifikan terhadap rantai pasok MBG dengan nilai $t = 3,428$ dan $\text{sig} = 0,002 (< 0,05)$. Demikian pula variabel kesiapan pemasok lokal (X3) berpengaruh signifikan dengan nilai $t = 2,636$ dan $\text{sig} = 0,012 (< 0,05)$. Sementara itu, variabel kesiapan standar mutu (X1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial dengan nilai $\text{sig} = 0,760 (> 0,05)$.

Uji-F (Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji-F (ANOVA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	95,854	3	31,951	14,017	.000
Residual	84,341	37	2,279		
Total	180,195	40			

Hasil uji-F pada Tabel 5 menunjukkan nilai F hitung = 14,017 dengan $\text{sig} = 0,000 (< 0,05)$. Hal ini berarti secara simultan, variabel kesiapan standar mutu (X1), kepatuhan halal (X2), dan kesiapan pemasok lokal (X3) berpengaruh signifikan terhadap rantai pasok MBG (Y). Dengan demikian, model regresi yang terbentuk layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.729	.532	.494

Tabel 6 menunjukkan nilai $R^2 = 0,532$, yang berarti sebesar 53,2% variasi rantai pasok MBG dapat dijelaskan oleh variabel kesiapan standar mutu, kepatuhan halal, dan kesiapan pemasok lokal. Sisanya sebesar 46,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kondisi infrastruktur logistik, kebijakan pemerintah daerah, dan dinamika pasar pangan lokal.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan halal merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi rantai pasok MBG di Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini sejalan dengan kondisi demografis wilayah yang memiliki mayoritas penduduk Muslim (sekitar 98%), sehingga jaminan kehalalan produk pangan menjadi faktor krusial yang tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga menjadi prasyarat kepercayaan publik terhadap kualitas program MBG. Hal ini selaras dengan penelitian Gunawan *et al.* (2021) yang menegaskan bahwa sistem jaminan halal yang terstruktur berkontribusi signifikan terhadap kepercayaan konsumen dan keberlangsungan rantai pasok pangan.

Kesiapan pemasok lokal juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap rantai pasok MBG. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan operasional pemasok yang mencakup kapasitas produksi, konsistensi kualitas, serta ketepatan waktu pengiriman menjadi faktor penentu kelancaran distribusi bahan pangan ke dapur-dapur SPPG. Di wilayah Masbagik, Sikur, dan Selong, kesiapan pemasok lokal masih berada pada tahap berkembang, di mana para pemasok umumnya telah mampu memenuhi kebutuhan dasar penyediaan bahan pangan, namun masih menghadapi kendala dalam menjaga konsistensi dan kontinuitas pasokan. Khairurrizki (2026) mencatat bahwa preferensi dapur SPPG terhadap pemasok skala besar yang telah bersertifikasi menjadi tantangan nyata bagi UMKM lokal untuk mengakses pasar MBG, meskipun UMKM setempat mampu memenuhi kriteria harga kompetitif dan standar gizi.

Sementara itu, kesiapan standar mutu tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap rantai pasok MBG. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi di mana sebagian besar pemasok lokal masih menerapkan praktik standar mutu secara informal dan belum terstandarisasi melalui sertifikasi resmi seperti SLHS, GMP, atau HACCP. Kondisi ini bukan berarti standar mutu tidak penting, melainkan pengaruhnya terhadap rantai pasok lebih bersifat tidak langsung dan termediasi oleh variabel kesiapan pemasok secara keseluruhan. Sebagaimana dinyatakan oleh BGN (2025), dapur MBG harus lulus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan sebelum beroperasi, namun pengawasan terhadap pemasok hulu masih memerlukan penguatan sistematis.

Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan dengan kontribusi 53,2% ($R^2 = 0,532$) terhadap variasi rantai pasok MBG. Nilai ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh dinamika rantai pasok MBG di Lombok Timur dapat dijelaskan oleh tingkat kesiapan mutu, kepatuhan halal, dan kapasitas pemasok lokal. Sisa 46,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ketersediaan infrastruktur cold chain, kebijakan pengadaan BGN, dan kondisi iklim yang memengaruhi pasokan bahan pangan pertanian (Suryana et al., 2021). Widyasari et al. (2025) dan Roos (2025) juga menegaskan bahwa keberhasilan program gizi nasional tidak hanya bergantung pada kesiapan pemasok, tetapi juga pada ekosistem kebijakan yang mendukung partisipasi UMKM lokal secara inklusif.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Pertama, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur perlu memperkuat program fasilitasi sertifikasi halal dan standar mutu pangan bagi UMKM lokal secara gratis atau bersubsidi. Kedua, kolaborasi antara BGN, BPJPH, Kemenkes, dan Dinas Kesehatan setempat perlu ditingkatkan dalam rangka membangun sistem sertifikasi terpadu yang ramah UMKM. Ketiga, pelatihan SJPH dan GMP perlu diselenggarakan secara berkala dan menjangkau pemasok di tingkat desa, khususnya di wilayah pemasok utama seperti Masbagik, Pringgasela, dan Sukamulia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial, kepatuhan halal ($\text{sig} = 0,002$) dan kesiapan pemasok lokal ($\text{sig} = 0,012$) berpengaruh signifikan terhadap rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur, sementara kesiapan standar mutu tidak berpengaruh signifikan secara parsial ($\text{sig} = 0,760$). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap rantai pasok MBG ($F = 14,017$; $\text{sig} = 0,000$) dengan koefisien determinasi $R^2 = 0,532$, yang berarti 53,2% variasi rantai pasok dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan kepatuhan halal melalui sertifikasi BPJPH dan peningkatan kesiapan kapasitas pemasok lokal merupakan prioritas utama yang perlu ditangani secara sistematis. Program fasilitasi sertifikasi, pelatihan SJPH dan GMP, serta penguatan koordinasi antara BGN, BPJPH, pemerintah daerah, dan UMKM lokal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas rantai pasok MBG. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi rantai pasok MBG, seperti infrastruktur logistik, dukungan teknologi traceability, dan aspek kebijakan pengadaan bahan pangan lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemasok pangan lokal, pengelola dapur SPFG, pelaku UMKM, serta pihak terkait di Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan data dan informasi selama penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada Badan Gizi Nasional, BPJPH, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang mendukung kajian mengenai kepatuhan halal, standar mutu, serta kesiapan pemasok lokal dalam memperkuat rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Gizi Nasional (BGN). (2025). Standar Global Diterapkan dalam Dapur MBG. *BGN*. <https://www.bgn.go.id/news/berita/standar-global-diterapkan-dalam-dapur-mbg>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Kementerian Agama RI.
- Gunawan, S., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8–14.
- Handayani, R., & Purnomo, E. P. (2023). Implementasi kebijakan ketahanan pangan berbasis UMKM dalam mendukung pembangunan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 112–125.
- Indonesia, K. K. R. (2026). Kemenkes Awasi Mutu MBG untuk 55,1 Juta Penerima Manfaat per Hari. *Kementerian Kesehatan RI – Rilis Berita*. <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-awasi-mutu-mbg-untuk-551-juta-penerima-manfaat-per-hari>
- Khairurrizki, M. (2026). Dapur MBG di Lombok Timur Tumbuh Subur, UMKM Mengaku Sulit Salurkan Produk. *NTBSatu*. <https://ntbsatu.com/2026/01/26/dapur-mbg-di-lombok-timur-tumbuh-subur-umkm-mengaku-sulit-salurkan-produk.html>
- Nurhayati, S., Mardhiyah, A., & Setiawan, B. (2022). Peran sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing UMKM pangan di era global. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(1), 55–68.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. (2019). *Sekretariat Negara Republik Indonesia*.
- Programme, W. F. (Ed.). (2026). School meals. Dalam *World Food Programme*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/school-meals>
- RI, K. P. (2025). Standar Mutu dan Keamanan Jadi Kunci Penting Pengembangan Bisnis IKM Pangan. *IKM Kemenperin*. <https://ikm.kemenperin.go.id/standar-mutu-dan-keamanan-jadi-kunci-penting-pengembangan-bisnis-ikm-pangan-1>
- Roos, D. O. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Sebagai Utopia/Distopia (Studi Hermeneutika Kekuasaan). *HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 19(1), 29–43.
- Suryana, A., Ariani, M., & Saliem, H. P. (2021). Penguatan rantai pasok pangan lokal untuk ketahanan pangan nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(2), 89–106.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(4), 1727–1736.
- Yusuf, M., & Hasbullah. (2022). Analisis kesiapan UMKM pangan di Nusa Tenggara Barat dalam memenuhi standar keamanan pangan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 178–195.